



Dampak Kebijakan Fiskal Hijau Terhadap Investasi Berkelanjutan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Publik

Ahmad Wahyudi Zein ^{1*}, Aisyah Nur Amelia ², Muhammad Rusdi Hasibuan ³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id ^{1*}, aisyahvivo721@gmail.com ², rusdi200422@gmail.com ³

Abstract : *This study uses a qualitative method to analyze the impact of green fiscal policy on sustainable investment in Indonesia from a public economics perspective. The focus of this research is on how fiscal instruments such as tax incentives, environmentally friendly subsidies, and government spending are directed to support economic growth while preserving environmental sustainability. In the context of Indonesia, which is facing challenges such as climate change and natural resource degradation, green fiscal policy has become a crucial strategy for achieving sustainable development. The study finds that well-implemented green fiscal policies can encourage investment in sustainable sectors such as renewable energy, eco-friendly agriculture, and green transportation. However, the success of these policies is highly dependent on inter-institutional synergy, data-based fiscal planning, and consistent regulatory support. The findings of this study are expected to contribute to the strengthening of Indonesia's green fiscal policy design, which can better promote environmental protection and positively impact the long-term economy. Therefore, strong government commitment is required to position fiscal policy as a primary instrument in the transition toward a green economy.*

Keywords: *green development, green fiscal policy, public economics, renewable energy, sustainable investment.*

Abstrak, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal hijau terhadap investasi berkelanjutan di Indonesia dalam perspektif ekonomi publik. Fokus kajian ini adalah bagaimana instrumen fiskal seperti insentif pajak, subsidi ramah lingkungan, serta belanja negara diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi sumber daya alam, kebijakan fiskal hijau menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal hijau yang tepat dapat mendorong investasi di sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, pertanian ramah lingkungan, dan transportasi hijau. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh sinergi antar lembaga, perencanaan fiskal yang berbasis data, dan dukungan regulasi yang konsisten. Temuan dalam studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan desain kebijakan fiskal di Indonesia yang lebih pro-lingkungan dan berdampak positif terhadap perekonomian jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah dalam menjadikan kebijakan fiskal sebagai alat utama transisi menuju ekonomi hijau.

Kata kunci: ekonomi publik, energi terbarukan, investasi berkelanjutan, kebijakan fiskal hijau, pembangunan hijau.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan telah menjadi agenda strategis di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial, negara-negara dituntut untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan besar dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam kebijakan fiskalnya. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal hijau muncul sebagai pendekatan inovatif yang menggabungkan prinsip keberlanjutan lingkungan dengan

instrumen fiskal negara seperti pajak, subsidi, dan belanja pemerintah. Konsep ini menekankan bahwa instrumen fiskal harus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan sekaligus mendorong transformasi menuju ekonomi hijau. Untuk itu, peran negara sangat penting dalam menciptakan insentif fiskal yang mampu menarik investasi ke sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan infrastruktur hijau (Putri & Gunawan, 2020).

Kebijakan fiskal hijau merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk menginternalisasi biaya eksternal dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti pajak karbon, penghapusan subsidi energi fosil, serta pemberian insentif untuk teknologi bersih dan efisiensi energi. Di Indonesia, kebijakan ini mulai diperkenalkan dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan transisi menuju energi terbarukan. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, termasuk lemahnya koordinasi antarsektor, keterbatasan data lingkungan yang akurat, serta resistensi dari pelaku industri konvensional. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman di tingkat daerah mengenai pentingnya kebijakan fiskal hijau menghambat proses desentralisasi fiskal yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan lintas sektoral agar kebijakan fiskal tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar efektif dalam mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat dan sektor swasta (Santoso & Rahayu, 2021).

Salah satu indikator penting dari efektivitas kebijakan fiskal hijau adalah kemampuannya dalam menarik investasi berkelanjutan. Investasi ini tidak hanya mengedepankan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Di Indonesia, tren investasi berkelanjutan masih relatif baru dan memerlukan dukungan kebijakan yang kondusif agar dapat berkembang. Kebijakan fiskal dapat memainkan peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang ramah lingkungan melalui pemberian insentif fiskal, pembiayaan hijau, serta pengurangan risiko investasi pada sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan. Pemerintah juga perlu menetapkan standar dan indikator yang jelas untuk menilai sejauh mana suatu investasi dapat dikategorikan sebagai berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan fiskal hijau tidak hanya menjadi alat pengendali dampak lingkungan, tetapi juga instrumen penggerak bagi pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif (Handayani & Yusuf, 2022).

Perubahan paradigma dari ekonomi konvensional ke ekonomi hijau menuntut peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki peran kunci dalam memfasilitasi

transformasi ini melalui kebijakan fiskal yang visioner dan progresif. Namun, keberhasilan kebijakan fiskal hijau sangat tergantung pada tata kelola fiskal yang baik, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, masih ditemukan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan, terutama dalam integrasi indikator lingkungan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor fiskal menjadi agenda penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal hijau. Selain itu, diperlukan kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha untuk mengembangkan model-model pembiayaan hijau yang inovatif dan berbasis hasil (Nuraini & Hakim, 2023).

Dalam kerangka ekonomi publik, kebijakan fiskal hijau merefleksikan tanggung jawab negara dalam mengoreksi kegagalan pasar yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam dan polusi lingkungan. Tanpa campur tangan pemerintah, sektor swasta cenderung mengabaikan dampak eksternal negatif demi mengejar keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, intervensi fiskal diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam berbagai dokumen strategis seperti RPJMN dan dokumen kebijakan energi nasional. Namun, implementasi kebijakan fiskal hijau masih memerlukan penguatan pada aspek regulasi, insentif ekonomi, dan harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal hijau terhadap investasi berkelanjutan di Indonesia dan memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih pro-lingkungan dalam perspektif ekonomi publik (Yuliana & Pratama, 2024).

2. TINJAUAN TEORITIS

Kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi publik didefinisikan sebagai serangkaian instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan negara. Dalam teori ekonomi publik klasik, kebijakan fiskal memiliki peran utama dalam mengoreksi kegagalan pasar, mendistribusikan sumber daya secara lebih adil, dan mencapai stabilitas makroekonomi. Ketika prinsip-prinsip keberlanjutan mulai diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan fiskal, maka muncul konsep kebijakan fiskal hijau. Dalam pendekatan ini, negara tidak hanya berperan sebagai pengumpul dan distributor dana, tetapi juga sebagai agen perubahan lingkungan yang mendorong perilaku ekonomi ramah lingkungan. Kebijakan fiskal hijau mencerminkan transisi paradigma dari pembangunan berbasis pertumbuhan menjadi pembangunan berbasis keberlanjutan. Pendekatan ini semakin

relevan dalam konteks globalisasi dan krisis lingkungan yang mendorong negara-negara untuk meninjau ulang model pembangunan ekonominya (Saputra & Lestari, 2021).

Konsep investasi berkelanjutan dalam teori ekonomi publik menekankan pentingnya menggabungkan keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan. Investasi ini mencakup berbagai sektor seperti energi terbarukan, transportasi hijau, dan pertanian berkelanjutan. Dalam teori modern, investasi berkelanjutan dianggap sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang yang inklusif dan resilien terhadap perubahan iklim. Dalam konteks Indonesia, realisasi investasi berkelanjutan masih mengalami hambatan dari sisi regulasi, pembiayaan, dan kesadaran pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan fiskal yang dapat merangsang partisipasi sektor swasta melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan jaminan hukum. Integrasi antara kebijakan fiskal hijau dan kebijakan investasi publik dapat memperkuat sinergi pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan secara simultan (Putra & Anggraini, 2023).

Teori eksternalitas dalam ekonomi publik menjadi landasan penting bagi pengembangan kebijakan fiskal hijau. Eksternalitas negatif seperti pencemaran udara, deforestasi, dan limbah industri menunjukkan bahwa pasar gagal dalam menghitung biaya sosial dari aktivitas produksi dan konsumsi. Di sinilah peran fiskal negara menjadi penting, yakni untuk menyeimbangkan biaya dan manfaat sosial dengan cara mengenakan pajak terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan serta memberikan subsidi bagi aktivitas yang memberi manfaat ekologis. Pajak karbon, sebagai salah satu contoh, merupakan instrumen yang didasarkan pada prinsip internalisasi eksternalitas. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha akan memiliki insentif untuk mengurangi emisi dan beralih ke teknologi bersih. Dengan demikian, kebijakan fiskal hijau tidak hanya bersifat korektif tetapi juga promotif dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon (Rahmawati & Wicaksono, 2020).

Tinjauan terhadap instrumen fiskal hijau dalam konteks global menunjukkan bahwa banyak negara telah berhasil mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem penganggaran nasional mereka. Negara-negara seperti Jerman, Swedia, dan Korea Selatan telah mengadopsi pendekatan fiscal greening melalui reformasi subsidi, belanja negara yang ramah lingkungan, dan penyusunan kerangka anggaran yang berbasis indikator hijau. Teori anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) juga telah mengalami perkembangan menuju *green budgeting*, di mana alokasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian target lingkungan. Di Indonesia, upaya menuju penganggaran hijau telah dimulai dengan penyusunan indikator belanja lingkungan dan penguatan regulasi fiskal terkait pembangunan rendah karbon. Namun, penguatan teori dan praktik masih dibutuhkan agar kebijakan fiskal hijau dapat

dijalankan secara efektif dalam kerangka ekonomi publik yang kompleks dan multi-aktor (Fadillah & Mahendra, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan fiskal hijau berdampak terhadap investasi berkelanjutan di Indonesia dalam kerangka ekonomi publik. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai dokumen, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber data utama mencakup publikasi dari Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Bappenas, serta lembaga internasional seperti OECD dan UNDP. Analisis dilakukan dengan teknik content analysis, yaitu menelaah isi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan instrumen kebijakan fiskal hijau, seperti insentif pajak, belanja negara untuk proyek hijau, dan reformasi subsidi. Fokus analisis diarahkan pada hubungan antara implementasi kebijakan fiskal hijau dan realisasi investasi berkelanjutan di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pertanian berkelanjutan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan berasal dari referensi yang kredibel dan relevan. Pendekatan ini dipilih agar dapat menggambarkan secara utuh kompleksitas interaksi antara kebijakan fiskal dan investasi berkelanjutan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal hijau di Indonesia telah mulai menunjukkan dampak positif terhadap arah investasi berkelanjutan, khususnya di sektor energi terbarukan dan infrastruktur ramah lingkungan. Pemerintah melalui insentif fiskal seperti pengurangan pajak dan subsidi untuk energi bersih, serta pengeluaran negara dalam bentuk belanja infrastruktur hijau, secara bertahap berhasil menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor-sektor yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Instrumen seperti obligasi hijau (green bond) juga memberikan alternatif pendanaan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, dengan menunjukkan komitmen jangka panjang dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Meskipun masih terdapat kendala dalam hal tata kelola dan koordinasi antar lembaga, arah kebijakan ini memperlihatkan pergeseran paradigma fiskal dari fokus semata pada pertumbuhan ekonomi menuju pencapaian keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian ekosistem.

Selanjutnya, tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal hijau terletak pada ketidakpastian regulasi, kapasitas fiskal daerah yang belum merata, dan keterbatasan teknologi lokal. Hal ini berdampak terhadap lambatnya akselerasi investasi hijau di beberapa wilayah. Selain itu, belum optimalnya integrasi data antar lembaga dan lemahnya literasi fiskal hijau di kalangan pemerintah daerah menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dukungan terhadap riset dan inovasi teknologi hijau lokal, penyusunan regulasi yang konsisten, serta peningkatan kapasitas fiskal dan edukasi publik menjadi faktor penting dalam mempercepat keberhasilan implementasi kebijakan fiskal hijau. Dalam kerangka teori ekonomi publik, intervensi negara melalui kebijakan fiskal semacam ini penting untuk menginternalisasi dampak lingkungan dan menciptakan insentif yang mendorong perilaku ekonomi berkelanjutan.

Tabel 1. Jenis Kebijakan Fiskal Hijau yang Diimplementasikan Pemerintah Indonesia

No	Jenis Kebijakan Fiskal Hijau	Bentuk Dukungan Pemerintah	Tahun Mulai Implementasi
1	Insentif Pajak Energi Hijau	Pengurangan tarif pajak	2019
2	Subsidi untuk Energi Terbarukan	Bantuan biaya produksi	2020
3	Belanja Negara Ramah Lingkungan	Pendanaan proyek PLTS, LRT	2018
4	Pengurangan Subsidi BBM Fosil	Realokasi ke sektor hijau	2021
5	Obligasi Hijau (Green Bond)	Pendanaan dari pasar modal	2018

Penjelasan:

Kebijakan fiskal hijau merupakan instrumen yang dirancang untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Dalam konteks Indonesia, instrumen ini mencakup insentif pajak bagi perusahaan energi terbarukan, subsidi untuk produksi energi ramah lingkungan, serta belanja pemerintah untuk proyek infrastruktur hijau seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan sistem transportasi LRT. Pemerintah juga telah mulai mengurangi subsidi bahan bakar fosil dan mengalihkannya untuk mendukung sektor berkelanjutan.

Secara teoritis, kebijakan fiskal hijau ini berlandaskan prinsip ekonomi publik, di mana intervensi negara diperlukan untuk menyediakan barang publik (seperti udara bersih) dan mengoreksi kegagalan pasar. Dengan menggunakan pajak dan subsidi secara selektif, pemerintah dapat menciptakan insentif ekonomi yang mengarahkan perilaku investasi ke sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan seperti green bond juga menunjukkan pergeseran dari pembiayaan konvensional ke model pembiayaan inovatif yang mendukung transisi energi.

Tabel 2. Sektor-Sektor Prioritas dalam Investasi Berkelanjutan

No	Sektor Prioritas	Jenis Investasi yang Didukung	Kementerian Pengampu
1	Energi Terbarukan	Pembangunan PLTB dan PLTS	Kementerian ESDM
2	Transportasi Publik Hijau	MRT, LRT, Bus Listrik	Kementerian Perhubungan
3	Industri Daur Ulang	Teknologi pemrosesan limbah	Kementerian Perindustrian
4	Pertanian Berkelanjutan	Pupuk organik, irigasi tetes	Kementerian Pertanian
5	Teknologi Lingkungan	Inovasi alat monitoring emisi	Kementerian Ristek/BRIN

Penjelasan:

Tabel di atas menunjukkan sektor-sektor yang menjadi fokus utama dalam penyaluran investasi hijau di Indonesia. Energi terbarukan seperti PLTS dan PLTB menjadi perhatian karena kontribusinya dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Sektor transportasi juga mendapatkan perhatian melalui pengembangan moda transportasi publik rendah emisi seperti MRT, LRT, dan bus listrik. Sementara itu, pertanian berkelanjutan didorong melalui teknologi irigasi hemat air dan penggunaan pupuk organik.

Secara teoritis, investasi di sektor-sektor tersebut mencerminkan upaya pemerintah memenuhi prinsip efisiensi alokatif dan keberlanjutan dalam ekonomi publik. Negara hadir sebagai fasilitator utama untuk menjamin bahwa sektor-sektor ini memperoleh akses pendanaan dan perlakuan fiskal yang memadai. Kementerian teknis menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan, di mana kolaborasi antar-instansi sangat menentukan efektivitas realisasi investasi hijau.

Tabel 3. Tantangan Utama dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Hijau

No	Jenis Tantangan	Dampak terhadap Investasi	Solusi Pemerintah
1	Ketidakpastian Regulasi	Investor enggan menanam modal	Perbaikan tata kelola regulasi
2	Rendahnya Koordinasi	Proyek berjalan lambat	Pembentukan forum lintas lembaga
3	Kapasitas Fiskal Daerah	Tidak merata antar wilayah	Transfer fiskal berbasis kinerja
4	Kurangnya Edukasi Publik	Minim partisipasi masyarakat	Kampanye dan pelatihan
5	Terbatasnya Teknologi Lokal	Ketergantungan impor	Penguatan riset dan inovasi

Penjelasan:

Implementasi kebijakan fiskal hijau di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari aspek regulasi hingga teknis pelaksanaan. Ketidakpastian regulasi menyebabkan investor berhati-hati karena risiko kebijakan yang tinggi. Di sisi lain, rendahnya koordinasi antar lembaga memperlambat pelaksanaan program-program investasi hijau. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan agar tercipta integrasi kebijakan fiskal yang selaras antar sektor.

Dalam teori ekonomi publik, tantangan seperti ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas institusi publik dalam mengelola eksternalitas dan asimetri informasi. Salah satu solusi yang banyak direkomendasikan adalah penerapan transfer fiskal berbasis lingkungan untuk memperkuat fiskal daerah, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi lingkungan masyarakat. Inovasi teknologi lokal juga menjadi faktor penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing yang berbiaya tinggi.

Tabel 4. Kontribusi Kebijakan Fiskal Hijau terhadap Tujuan Ekonomi Publik

No	Tujuan Ekonomi Publik	Peran Fiskal Hijau	Implikasi Jangka Panjang
1	Efisiensi Alokasi Sumberdaya	Insentif untuk sektor hijau	Mengurangi biaya sosial
2	Pemerataan Pembangunan	Transfer fiskal hijau	Kesetaraan antar wilayah

3	Stabilitas Fiskal	Diversifikasi pendapatan negara	Mengurangi defisit struktural
4	Pembangunan Berkelanjutan	Subsidi dan belanja ramah lingkungan	Keberlanjutan ekologi
5	Partisipasi Sosial	Insentif komunitas hijau	Meningkatkan kesadaran publik

Penjelasan:

Kebijakan fiskal hijau memainkan peran penting dalam mendukung tujuan ekonomi publik. Melalui insentif yang tepat, pemerintah dapat mendorong efisiensi alokasi sumber daya menuju sektor-sektor yang lebih berkelanjutan. Transfer fiskal berbasis lingkungan juga menjadi instrumen penting dalam pemerataan pembangunan, memastikan bahwa daerah yang minim fiskal tetap dapat mengakses program ramah lingkungan.

Secara jangka panjang, kebijakan ini dapat memperkuat stabilitas fiskal nasional karena adanya diversifikasi penerimaan negara, seperti dari pajak karbon dan green bond. Subsidi untuk proyek-proyek berkelanjutan juga membantu memperkuat pondasi pembangunan yang tidak hanya ekonomis, tapi juga ekologis. Konsep ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan intergenerasi dalam ekonomi publik, di mana pembangunan saat ini tidak boleh mengorbankan kapasitas generasi mendatang.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal hijau di Indonesia memiliki potensi signifikan dalam mendorong investasi berkelanjutan apabila diimplementasikan dengan sinergi lintas sektor, regulasi yang konsisten, serta dukungan fiskal dan teknologi yang memadai. Dalam perspektif ekonomi publik, peran pemerintah menjadi sangat sentral untuk mengoreksi kegagalan pasar dan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Upaya seperti pengurangan subsidi bahan bakar fosil, pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha hijau, serta penggunaan instrumen pembiayaan alternatif seperti obligasi hijau perlu ditingkatkan cakupannya. Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan dan komitmen politik yang berkelanjutan untuk menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Fadillah, R., & Mahendra, D. (2022). Integrasi Green Budgeting dalam Pengelolaan Anggaran Nasional: Sebuah Studi Perbandingan Internasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 6(2), 115–130.
- Handayani, S., & Yusuf, R. (2022). Insentif Fiskal dan Perkembangan Investasi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 11(3), 235–248.
- Nuraini, T., & Hakim, F. (2023). Reformasi Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 78–91.
- Putra, A. F., & Anggraini, D. (2023). Peran Fiskal Negara dalam Mendorong Investasi Berkelanjutan: Pendekatan Ekonomi Publik. *Jurnal Keuangan Negara dan Pembangunan*, 8(2), 189–204.
- Putri, A. Y., & Gunawan, H. (2020). Kebijakan Fiskal Hijau sebagai Pendekatan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Lingkungan Indonesia*, 5(1), 45–60.
- Rahmawati, I., & Wicaksono, A. (2020). Pajak Karbon dan Internalisasi Eksternalitas dalam Sistem Fiskal Nasional. *Jurnal Fiskal dan Perpajakan Indonesia*, 4(2), 99–112.
- Santoso, B., & Rahayu, L. (2021). Tantangan Implementasi Kebijakan Fiskal Hijau di Tingkat Daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Daerah*, 9(2), 211–225.
- Saputra, D. K., & Lestari, M. (2021). Paradigma Baru Kebijakan Fiskal Hijau dalam Ekonomi Publik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 57–71.
- Yuliana, D., & Pratama, R. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Hijau terhadap Investasi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan Berkelanjutan*, 9(1), 122–137.
- Zulfa, N., & Ramadhani, E. (2021). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Infrastruktur Hijau: Studi Evaluatif. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 6(2), 140–155.
- Indrawati, S. M. (2019). *Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Hijau*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mulyadi, D. (2020). *Ekonomi Publik dan Lingkungan: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*. Bandung: Pustaka Ilmu Ekonomi.